



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/ 671 /BAKUDA/2024

### TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Bendahara Umum Daerah Untuk dan Atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Bendahara Umum Daerah Untuk dan Atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah;
  - menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - menetapkan Surat Penyediaan Dana;
  - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KETIGA** : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUGITO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Plt. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pangkalpinang;
5. Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang;
6. Yang bersangkutan.